

ANALISIS PENDEKATAN AKSESIBILITAS HOLISTIK PENDIDIKAN MELALUI AKSELERASI PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI TANAH PAPUA

Hendy Setiawan¹, Choirunnisa²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri, Jl. Raya Soekarno-Hatta No. Km. 03, Gondoarum, Jambearum, District. Patebon, Kendal Regency, Central Java 5135

²Department of Communication Studies, Faculty of Communication and Design, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitpek No. 46, Buaran, Pamulang District, South Tangerang City, Banten 15310

E-mail: hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id, choirunnisa2630@gmail.com

ABSTRAK. Aksesibilitas pendidikan di Papua tetap menjadi isu penting yang belum terselesaikan. Meskipun Papua telah memiliki otonomi khusus selama lebih dari dua dekade, akses pendidikan yang merata belum tercapai. Banyak warga Papua yang masih kekurangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Sektor pendidikan masih tertinggal jauh. Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mempercepat akses pendidikan yang merata di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sekunder dan relevan. Sumber-sumber ini diperoleh melalui laporan, arsip, buku, jurnal, laporan berita, majalah, situs web, surat kabar, media massa, dan sumber relevan lainnya yang selaras dengan tujuan dan rumusan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, termasuk pengumpulan analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan secara holistik di Papua masih jauh dari harapan. Kesenjangan yang serius masih terjadi dalam pembangunan pendidikan di Papua. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah terpencil dan pusat pemerintahan di Papua. Daerah terpencil di Papua cenderung tertinggal, atau bahkan tidak terkesan, oleh pembangunan pendidikan. Ironisnya, daerah perkotaan dan pusat kota di Papua cenderung memiliki indeks perkembangan pendidikan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, daerah terpencil dan terlindungi di Papua memerlukan intervensi pemerintah yang serius. Akses yang setara terhadap pendidikan harus ditangani secara bersamaan dengan kebijakan otonomi khusus. Pendanaan tahunan yang substansial untuk otonomi khusus harus berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas pendidikan dan mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua.

Kata kunci: akselerasi kesejahteraan, pengembangan pendidikan, kesetaraan akses, pendidikan berkualitas

ANALYSIS OF THE HOLISTIC EDUCATIONAL ACCESSIBILITY APPROACH THROUGH THE ACCELERATED EQUITABLE DISTRIBUTION OF QUALITY IN PAPUA LAND

ABSTRACT. Educational accessibility in Papua remains a critical, unresolved issue. Despite having held special autonomy status for over two decades, Papua has yet to achieve equitable access to education. Many Papuans still lack access to quality education, and the education sector lags significantly behind. This paper aims to identify the challenges involved in accelerating equitable access to education in Papua. The study employs a qualitative approach utilizing a literature review method, enabling the author to gather data from various relevant secondary sources—including reports, archives, books, journals, news reports, magazines, websites, newspapers, mass media, and other sources aligned with the research objectives. Qualitative data analysis techniques were used, encompassing data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that holistic educational accessibility in Papua falls far short of expectations. Serious disparities persist in educational development across the region, with a significant gap between remote areas and administrative centers. Remote areas tend to lag behind—or remain virtually untouched—by educational development efforts. Ironically, urban areas and city centers in Papua generally boast far superior educational development indices. Consequently, remote and isolated areas in Papua require serious government intervention. Addressing equitable access to education must go hand-in-hand with special autonomy policies; the substantial annual funding allocated for special autonomy should contribute to improving educational accessibility while also helping to end conflict and violence in Papua.

Key words: accelerating welfare, developing education, equalizing acces, quality education

PENDAHULUAN

Tanggal 17 Februari tahun 2025 ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan melakukan demonstrasi yang berkumpul di Kantor Bupati Jayawijaya. Ribuan pelajar Papua tersebut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua (Putra, 2025). Aksi penolakan kebijakan MBG di Papua ini sebetulnya juga terjadi di Kabupaten Yakuimo di mana tempat itu disebut-sebut sebagai pemantik bagi aksi-aksi serupa di Papua yang

lebih masif, seperti di Intan Jaya, Jayapura, hingga Nabire. Mereka dalam orasinya menekankan bahwa Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis dari negara ketimbang program MBG. Tuntutan penolakan MBG di Papua itu beralasan rasional, di mana program MBG dinilai tidak menjadi solusi bagi akar permasalahan kesejahteraan di Papua (Indonesia et al., 2025). Namun, akar persoalan kesejahteraan Papua yang masih belum terwujud dibutuhkan kebijakan lain, salah satunya pemenuhan akses pendidikan bagi mereka.

Peristiwa penolakan MBG yang dilakukan oleh ribuan siswa di Papua merupakan salah satu bentuk kegagalan negara dalam merespon akar masalah kesejahteraan. Negara tidak mampu melihat fakta bahwa sampai hari ini masyarakat Papua belum merasakan kehidupan sejahtera. Mereka hidup dalam sebuah paradox di mana mereka masih nirsejahtera dalam wilayah yang memiliki keberlimpahan sumber daya alamnya (Setiawan & Choirunnisa, 2023)&(Setiawan, 2022c). Siapapun tentu bertanya-tanya bagaimana mungkin Papua yang memiliki keberlimpahan potensi dan sumber daya alam namun mereka tidak merasakan satu kehidupan yang bahagia sejahtera hingga hari ini (Setiawan, 2024). Bahkan kebijakan desentralisasi asimetris yang diikuti oleh pendanaan otonomi khusus yang sudah berjalan setidaknya dua dekade tidak memberikan transformasi signifikan bagi kesejahteraan di Papua (Setiawan, 2022b). Kondisi tersebut tentu memerlukan peran dan intervensi negara yang lebih besar bagi kesejahteraan Papua tanpa terkecuali.

Masalah kesejahteraan Papua tentu banyak faktor kompleks yang mempengaruhinya. Namun demikian, isu pendidikan bagi Papua menjadi salah satu aspek solusi yang mampu membawa kehidupan masyarakat Papua lebih baik (Alfasisromarakap et al., 2021). Oleh karena itu, pendidikan seringkali disebut sebagai pilar penting dalam membangun bangsa. Pendidikan diibaratkan sebagai wajah pembangunan sebuah suatu negara. Begitupun juga di Papua, di mana pembangunan kesejahteraan Papua yang lebih maju dan berkualitas juga harus dibangun melalui keterpenuhinya akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan tentunya harus bersifat inklusif. Pendidikan memiliki daya kekuatan untuk mentransformasikan sesuatu, baik menuju tatanan perbaikan maupun penyempurnaan (Oruh et al., 2023). Oleh karena itu, mewujudkan kualitas dan akses pendidikan bagi Papua menjadi agenda prioritas yang harus ditunaikan oleh negara sebagai amanat konstitusi akan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rendahnya perhatian negara akan agenda pendidikan yang merata dan berkualitas di Papua tentu menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi. Ketertinggalan kualitas pendidikan itu tentunya juga harus mampu diakselerasi agar kehidupan mereka memiliki kesejahteraan yang sejajar dengan wilayah lainnya. Negara harus mampu memiliki intervensi kebijakan signifikan bahwa pendidikan berkualitas harus mampu di wujudkan di seluruh jengkal Tanah Papua. Rendahnya kualitas pendidikan di Papua tercermin dalam capaian indeks pembangunan manusia masih cukup tertinggal. Tabel 1 berikut merupakan capaian *Human Development Index* di Tanah Papua

Tabel 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua Pasca Pemekaran Wilayah 2022-2024

No.	Provinsi	2022	2023	2024
(1)	Papua	61,39	73,23	73,83
Kabupaten/Kota		Ketercapaian		
1	Kota Jayapura	80,61	81,14	81,98
2	Kab. Biak Numfor	72,85	73,46	74,95
3	Kab. Jayapura	72,67	73,50	75,32
4	Kab. Keerom	67,24	68,08	69,87
5	Kab. Kepulauan Yapen	68,41	69,11	70,12
6	Kab. Sarmi	64,86	65,80	67,89
7	Kab. Supiori	63,65	64,61	66,37
8	Kab. Waropen	65,67	66,46	68,13
9	Kab. Membramo Raya	53,10	54,08	59,48
(2)	Papua Barat	65,89	67,47	67,69
1	Kab. Fakfak	70,26	70,85	71,52

2	Kab. Kaimana	67,72	68,31	69,20
3	Kab. Manokwari	73,92	74,52	75,15
4	Kab. Manokwari Selatan	60,68	61,55	62,45
5	Kab. Pegunungan Arfak	57,01	57,82	58,71
6	Kab. Teluk Bintuni	68,29	69,01	69,79
7	Kab. Teluk Wondama	63,02	63,84	64,52
(3)	Papua Tengah	Pemekaran	59,44	60,25
1	Kab. Nabire	69,91	70,84	71,77
2	Kab. Intan Jaya	49,25	50,19	50,71
3	Kab. Puncak Jaya	49,84	50,81	51,78
4	Kab. Puncak	43,87	44,59	45,60
5	Kab. Paniai	57,14	57,91	58,69
6	Kab. Deiyai	50,42	51,18	52,07
7	Kab. Mimika	75,08	75,91	76,85
8	Kab. Dogiyai	55,72	56,70	57,68
(4)	Papua Pegunungan	Pemekaran	53,45	54,43
1	Kab. Jayawijaya	59,60	60,50	61,03
2	Kab. Lany Jaya	49,62	50,56	51,59
3	Kab. Membramo Tengah	49,25	50,22	-
4	Kab. Nduga	34,10	35,19	36,30
5	Kab. Pegunungan Bintang	47,21	48,18	49,36
6	Kab. Tolikara	50,51	51,48	52,05
7	Kab. Yalimo	49,90	50,87	51,85
8	Kab. Yakuimo	50,25	51,19	-
(5)	Papua Selatan	Pemekaran	68,24	68,86
1	Kab. Asmat	52,22	53,19	53,92
2	Kab. Boven Digoel	62,52	63,46	64,26
3	Kab. Mappi	59,61	60,57	61,51
4	Kab. Merauke	71,24	72,19	72,73
(6)	Papua Barat Daya	68,60	69,07	69,65
1	Kab. Maybrat	60,49	61,29	61,83
2	Kab. Raja Ampat	-	-	66,60
3	Kab. Sorong	66,69	67,49	69,69
4	Kab. Sorong Selatan	63,08	63,94	64,54
5	Kab. Tambrau	-	-	58,31
6	Kota Sorong	78,98	79,65	80,55
**	Nasional	73,77	74,39	75,02

Sumber: diolah peneliti dari laporan BPS Nasional, 2024

Tabel di atas merupakan angka ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua tahun 2022-2024. Berdasarkan ketercapaiannya masih banyak ditemukan kabupaten dan kota di Tanah Papua dengan IPM yang cukup miris. Misalnya saja di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan di mana dalam tahun 2022-2024 capaian IPM hanya 34-36. Temuan ini tentu menjadi perhatian serius bagaimana negara hadir dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas IPM yang ada di Tanah Papua. Sementara salah satu komponen utama dalam meningkatkan kualitas IPM ialah perbaikan baik pemenuhan akses dan ketersediaan fasilitas yang memadai dari sektor pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu dengan perjalanan historis yang begitu panjang dan juga berbagai kebijakan khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka tentu ini perlu kebijakan khusus untuk mengakselerasi ketertinggalan tersebut (Tutukansa & Tuffahati, 2022b).

Negara perlu menghadirkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas dalam membangun Indonesia emas 2025 (Sutan & Setiawan, 2024). Rendahnya IPM di Papua dengan segala kebijakan yang sudah diberikan tentu menjadi pertanyaan kritis akan komitmen negara dalam membangun kesejahteraan di sana melalui pendidikan. Oleh karena itu aksesibilitas pendidikan yang setara menuju pendidikan yang berkualitas menjadi penting bagi kemajuan pembangunan Papua.

Studi tentang pengembangan, pemerataan, dan pembangunan terhadap sektor pendidikan di Tanah Papua sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tahun 2019, Cahyaningsih dan Fitradhy melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal asimetris terhadap pembangunan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Papua. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal asimetris tidak secara efektif berdampak terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini justru menolak berbagai studi lain yang mengklaim bahwa desentralisasi fiskal asimetris disebut berdampak signifikan bagi bidang kesehatan dan pendidikan di Papua (Cahyaningsih & Fitradhy, 2019).

Temuan tersebut dikuatkan oleh studi yang dilakukan Mustikawati dan Maulana di tahun 2020. Mereka melakukan pendalaman riset tentang keadaan Provinsi Papua sebelum dan sesudah hampir dua dekade (18 tahun) pemberian dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan di setiap sektor terjadi sangat lambat bahkan sampai bisa dikatakan stagnan. Pergerakan perubahan yang begitu lambat inilah yang sering diasosiasikan bahwa kebijakan otonomi khusus tidak berdampak besar bagi pembangunan Tanah Papua. Hal ini tidak berbanding dengan kucuran dana yang setiap tahunnya semakin besar (Mustikawati & Maulana, 2020). Kedua penelitian tersebut menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak mengalami perubahan yang lebih maju secara signifikan sekalipun dukungan kapasitas fiskal dari pemerintah semakin besar.

Selanjutnya studi lebih khusus dilakukan oleh Rahma dan Arcana tahun 2021 terhadap tingkat risiko putus sekolah pada remaja di Provinsi Papua tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari kondisi sosial ekonomi miskin lebih berisiko tinggi untuk putus sekolah. Kondisi itu akan diperparah tatkala para remaja tersebut sudah berasal dari status miskin dan bekerja di sektor informal (Rahma & Arcana, 2021).

Studi tersebut juga dikuatkan oleh temuan Tutukansa dan Tuffahati tahun 2022. Masalah kualitas pendidikan di Papua masih cukup kompleks, karena masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, kesadaran orang tua, perbedaan strata sosial, yang yang tidak kalah penting ialah faktor keamanan (Tutukansa & Tuffahati, 2022b). Realitas itu menandakan bahwa pemerataan pendidikan bagi Papua masih panjang sehingga perlu strategi untuk mengakselerasinya.

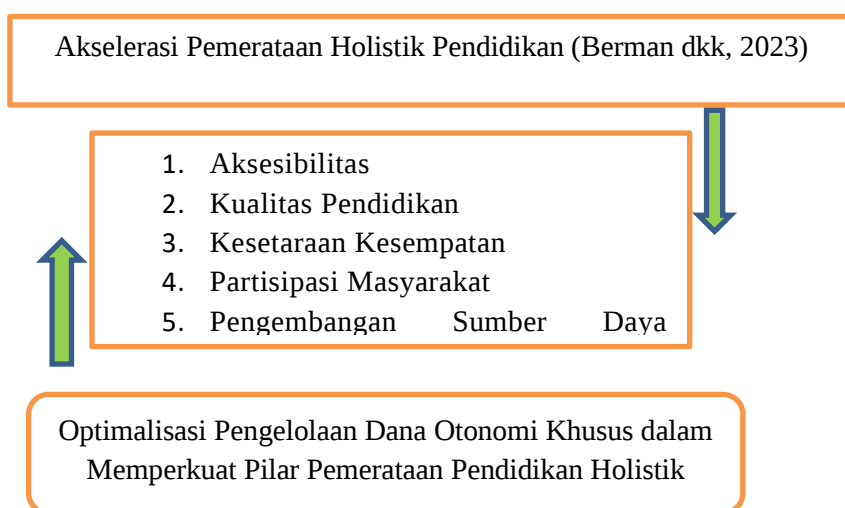
Studi terakhir dilakukan oleh Sihombing tahun 2023 tentang pemerataan pendidikan di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik Panel Least Square (PLS) di mana diperoleh hasil bahwa pendanaan dan infrastruktur pendidikan memiliki hubungan signifikan dan negatif. Sementara variabel pendapatan memiliki hubungan positif dan hasilnya tidak signifikan. Kesimpulan akhir menunjukan bahwa terdapat disparitas pendidikan yang tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia (Sihombing, 2023).

Beberapa studi tersebut memiliki kesamaan yakni pemerataan pendidikan di Tanah Papua masih jauh dari harapan. Hal itu terbukti di mana masih terjadi kesenjangan pemerataan pendidikan. Namun demikian, beberapa peneliti tersebut tidak menguraikan secara spesifik mengapa pemerataan dan akses pendidikan di Tanah Papua sulit diwujudkan. Oleh karena itu guna melengkapi penelitian sebelumnya maka peneliti akan menggunakan pendekatan aksesibilitas pendidikan holistik di Tanah Papua. Pendekatan ini masih terbatas digunakan dan memberi ruang bagi penulis untuk mengungkap tantangan-tantangan yang di hadapi dalam mewujudkan akselerasi kesejahteraan melalui pendidikan di Papua. Lagi pula para peneliti terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan otonomi khusus dan desentralisasi fiskal dalam mengurai pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Pendekatan ini cenderung menyoroti bagaimana kemampuan fiskal dan pengaturan khusus digunakan dalam membenahi masalah pendidikan. Penulis menawarkan penggunaan pendekatan tersebut untuk menganalisis akselerasi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dalam mengakselerasi pendidikan holistik untuk Papua yang lebih maju dan berkualitas.

Oleh karena itu rumusan utama masalah riset ini ialah bagaimana akselerasi kesejahteraan yang diberikan negara melalui pemerataan akses pendidikan di Tanah Papua? Lantas tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah hingga pemerataan pendidikan di sana tidak mudah diwujudkan? Pertanyaan ini penting untuk didiskusikan dalam tulisan ini agar negara melihat sejauh mana ketercapaian negara bekerja untuk pembangunan manusia di Papua. Tulisan ini diharapkan memberikan telaah mendalam terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan berkualitas di tengah kucuran dana otonomi khusus.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini ingin menjawab akselerasi pemerataan holistik pendidikan di Tanah Papua. Di tengah kucuran dana otonomi khusus sejak tahun 2002 pasca disahkannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pendanaan tersebut salah satunya diorientasikan dalam upaya mengakselerasi sektor pendidikan yang selama ini masih jauh tertinggal. Faktanya, di tengah kucuran desentralisasi fiskal tersebut Papua masih mengalami stagnasi dalam bidang pendidikan, sehingga memunculkan pertanyaan sejauh mana dana otonomi khusus Papua mampu membenahi sektor pendidikannya. Tulisan ini berangkat dari permasalahan tersebut, maka dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Bagan1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Desain studi kepustakaan memberikan ruang bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari teori dan data dari berbagai referensi yang relevan dengan kebutuhan penelitian, seperti buku, jurnal, arsip, laporan, dokumentasi, laporan, berita, media, ataupun sumber sekunder lainnya yang sejalan dan mendukung masalah penelitian (Malahati et al., 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini di dalam teknik analisis datanya menggunakan konsep yang disampaikan oleh Miles dan Huberman, di mana dalam penelitian kualitatif melewati proses pengumpulan data, reduksi data, pemaparan atau sajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan (Setiawan et al., 2023). Pada tahap pengumpulan data, peneliti tentu memastikan setiap langkah koleksi data dilakukan secara hati-hati dengan memastikan data yang dikumpulkan relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Sementara dalam tahap reduksi data peneliti melakukan filterisasi data yang valid dan akurat sesuai kebutuhan penelitian. Pada tahap pemaparan, peneliti akan menampilkan data temuan, baik berupa visualisasi gambar, data statistik, maupun data kuantitatif yang lain yang menguatkan penelitian. Terakhir, yakni tahap penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan mengambil keputusan hasil utama dari temuan hasil penelitian (Creswell, 2014).

Penelitian ini dilakukan dari 1 Desember 2025 hingga 15 Februari 2026.. Lokus yang digunakan dalam penelitian ini ialah akselerasi kesejahteraan di masyarakat Tanah Papua melalui aksesibilitas pendidikan yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis pemerataan holistik pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Berman et al (2023). Merujuk tulisannya yang berjudul *Responsive Teaching for Sustainable Learning: A Framework for Inclusive Education*, dia menyatakan bahwa pendekatan pemerataan holistik pendidikan diukur dengan lima barometer utama, yakni aksesibilitas, kualitas pendidikan, kesetaraan kesempatan, partisipasi masyarakat, serta pengembangan sumber daya. Indikator-indikator tersebut akan menjadi pisau teoritis yang digunakan oleh peneliti dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan terbagi dalam lima sub-bab utama sesuai dengan indikator teori ada dalam kerangka penelitian. Sub-bab pertama akan diuraikan mengenai aksesibilitas pendidikan di Tanah Papua. Indikator ini melihat bagaimana pendidikan itu diakses oleh seluruh warga. Sub-bab kedua akan menguraikan tentang kualitas pendidikan di sana. Indikator ini akan melihat bagaimana kualitas pendidikan yang berkualitas sudah relevan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sub-bab ketiga yakni akan mengurai tentang kesetaraan pendidikan bagi masyarakat Papua. Indikator ini menguraikan bagaimana kesempatan masyarakat Papua dalam mengakses pendidikan dalam mencapai potensi mereka. Sub-bab keempat yakni berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya melalui pendidikan. Ini akan menguraikan bagaimana ketercapaian pendidikan yang sedang dan telah mereka tempuh. Terakhir yakni sub-bab kelima berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan holistik. Bagian ini akan memaparkan bagaimana kompleksitas masalah yang dihadapi dalam membangun Papua melalui pendidikan yang jauh lebih baik dan maju.

Aksesibilitas dalam Akselerasi Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas dalam menyongsong Indonesia emas 2045 harus mendapatkan prioritas yang lebih serius (Sutan & Setiawan, 2024). Salah satu persoalannya ialah aksesibilitas masyarakat dalam pendidikan itu sendiri. Terlebih pendidikan di kawasan-kawasan terpencil Indonesia, sebut saja Tanah Papua. Bumi Indonesia di bagian paling timur tersebut merasakan bagaimana aksesibilitas masih menjadi persoalan pelik yang membuat mereka masih dalam keterkungkungan sosial. Aksesibilitas pendidikan yang sangat timpang jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan semakin memperparah dampak buruk bagi keberlangsungan masa depan masyarakat Papua (Azkia, 2024). Aksesibilitas yang baik harus mampu mendekatkan antara masyarakat dengan layanan pendidikan sehingga mampu menciptakan luaran kualitas sumber daya manusia yang handal.

Setidaknya ada lima hal utama jika berbicara tentang aksesibilitas layanan pendidikan berkualitas di Tanah Papua. Lima hal aksesibilitas itu mencakup kondisi geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, dan sektor keamanan.

Kondisi geografis Tanah Papua sampai saat ini masih menjadi kendala utama dan signifikan dalam mewujudkan perbaikan pendidikan berkualitas. Keadaan geografis juga menjadi sebuah tantangan di mana hampir sebagian besar geografis Papua didominasi oleh hutan belantara dan pegunungan-pegunungan sehingga akses dan fasilitas pendidikan menciptakan jarak ke masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Terutama di wilayah-wilayah pedalaman Papua, tentu mereka akan sangat merasakan bahwa akses pendidikan bagi mereka hanya sebatas harapan mengingat betapa sulitnya medan menuju akses pendidikan (Wijaya, 2023).

Aksesibilitas pendidikan di Tanah Papua masih belum sepenuhnya diselesaikan. Perlu kebijakan dan komitmen khusus dari pemerintah untuk menangani hal tersebut. Terlebih masalah aksesibilitas di sana adalah

persoalan dasar hingga hari ini. Jika tidak, tentu pemerintah tidak akan bisa mengharapkan perubahan bagi mereka bila kemampuan literasi saja tidak terbangun. Tanpa kemampuan literasi yang baik maka bagaimana mungkin mereka mampu memproduksi solusi untuk menyelesaikan permasalahannya jika memahami situasi yang mereka alami saja tidak mampu. Oleh karenanya pendidikan yang berkualitas bagi mereka akan meningkatkan literasi yang berguna bagi kehidupan mereka ke depan.

Selain masalah geografis, aksesibilitas layanan pendidikan di Tanah Papua juga diperhadapkan dengan tantangan terbatasnya infrastruktur pendidikan dan lemahnya sumber daya manusia. Terbatasnya infrastruktur di Papua menunjukkan jumlah layanan pendidikan yakni jumlah sekolah yang terbatas. Diperparah lagi dengan minimnya ketersediaan guru kelas dan tenaga mengajar di sana. Bahkan ironisnya jumlah guru yang terbatas diikuti dengan tingkat ketidakhadiran guru di Papua sebesar 82%. Alasannya mengapa hampir sebagian guru tidak hadir dalam pengajaran yakni mereka tidak merasa betah untuk mengajar di sana serta jarak rumah guru ke sekolah yang cukup jauh (Hisanah et al., 2022).

Keadaan tersebut kemudian akan menjadi lumrah jika peran guru kelas di beberapa sekolah yang ada di Papua kemudian melibatkan Tentara Nasional Indonesia yang bahkan sampai saat ini mereka masih diperbantukan. Terlebih sekolah-sekolah yang ada di kawasan pedalaman Tanah Papua, peran guru diambil alih oleh TNI. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur pendidikan dan jumlah guru yang terbatas masih saja menjadi masalah klasik yang menghambat perwujudan kesejahteraan Papua melalui pendidikan. Tidak terdistribusinya lembaga sekolah dan tenaga pendidik di Papua harus menjadi refleksi pemerintah untuk melakukan kebijakan khusus untuk akselerasi kemajuan pendidikan di sana.

Masalah aksesibilitas pendidikan Papua juga terhambat oleh masih adanya kesenjangan kehidupan sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah-wilayah di kawasan Tanah Papua masih mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi yang begitu besar. Hal itu bisa dilihat di mana sampai saat ini kawasan-kawasan di sana masih memiliki presentasi kemiskinan dan jumlah masyarakat ekonomi miskin tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Tabel 2 adalah profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 dengan urutan 10 besar tertinggi.

Tabel 2. 10 Provinsi dengan Presentase Kemiskinan Tertinggi di Indonesia pada Maret 2024 Berdasar Data BPS

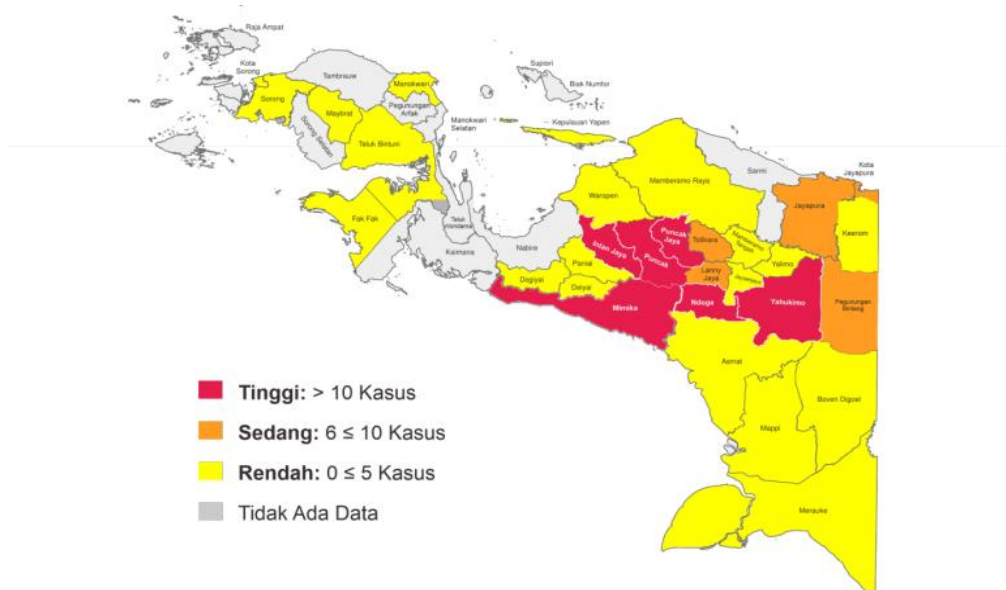
Provinsi	Persen (%)	Jumlah Jiwa Miskin	Garis Kemiskinan per Kapita	Garis Kemiskinan per Rumah Tangga
Papua Pegunungan	32,97%	365.430 orang	Rp. 1.007.060/bulan	Rp. 4.743.253/bulan
Papua Tengah	29,76%	308.480 orang	Rp. 764.115/bulan	Rp. 3.461.441/bulan
Papua Barat	.21,66%	110.160 orang	Rp. 793.804/bulan	Rp. 4.659.629/bulan
Nusa Tenggara Timur	19,48%	1.127.570 orang	Rp. 527.275/bulan	Rp. 3.031.831/bulan
Papua Barat Daya	18,13%	102.270 orang	Rp. 756.237/bulan	Rp. 5.316.346/bulan
Papua Selatan	17,44%	92.200 orang	Rp. 519.979/bulan	Rp. 3.135.473/bulan
Papua	17,26%	152.910 orang	Rp. 674.371/bulan	Rp. 3.864.146/bulan
Maluku	16,05%	297.680 orang	Rp. 713.503/bulan	Rp. 4.602.094/bulan

Gorontalo	14,57%	177.990 orang	Rp. 473.006/bulan	Rp. 2.431.251/bulan
Aceh	14,23%	804.530 orang	Rp. 661.227/bulan	Rp. 3.431.768/bulan

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan 10 provinsi tersebut, enam diantaranya ialah provinsi di Papua. bahkan sejak pemekaran saja, Papua masih menyisakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebelum dimekarkan dalam wilayah otonom seperti saat ini, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi dua provinsi yang selalu menyandang masalah kemiskinan tinggi. Namun, sejak dimekarkan kembali kemiskinan di Papua semakin merata bahkan wilayah Papua mendominasi penyandang kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini tentu menjadi alasan bagi mereka bila untuk memenuhi kebutuhan pangan saja mereka kesulitan, bagaimana mungkin mereka membayar biaya pendidikan untuk memperoleh kebutuhan dasar yang semestinya negara berikan. Perluasan pembangunan layanan dasar termasuk layanan pendidikan harus menjadi isu strategis bagi pemerintah untuk membangun Papua yang lebih baik (Rahayu, 2024).

Terakhir masalah aksesibilitas pendidikan Papua terletak pada isu keamanan mereka. Terlebih sampai saat ini, Papua masih menjadi wilayah konflik bersenjata yang terus berlanjut sampai saat ini (Setiawan & Choirunnisa, 2023)&(Setiawan, 2022a). Gambar 1 merupakan peta wilayah kekerasan dan konflik di Papua.



Sumber: (Bappeda, 2024)

Gambar 1. Peta Kekerasan dan Konflik Papua

Berdasarkan peta kekerasan dan konflik di atas, maka zona merah ialah ialah zona yang memiliki tingkat kekerasan dan konflik dengan intensitas tinggi. Kawasan itu meliputi Mimika, Intan Jaya, Puncak, Nduga, Puncak Jaya, dan Yalukhimo. Sementara kawasan dengan intensitas kekerasan dan konflik skala sedang yakni ditandai dengan warna kuning. Khusus di kawasan zona merah tingkat aksesibilitas pendidikan jauh dari kondisi aman. Tingginya intensitas konflik dan kekerasan membuat para guru enggan untuk menjadi guru di sana. Misalnya saja fakta terbaru, sebanyak enam guru di Yalukhimo Papua pegunungan tewas dalam serangan brutal Tentara pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pada 21 Maret tahun 2025 (Nugroho, 2025). Bayangkan saja terbatasnya guru di kawasan zona merah Papua masih saja terkena dampak konflik kekerasan yang berujung hilangnya nyawa. Apabila pemerintah tidak mampu

menurunkan tingkat konflik dan kekerasan di zona merah tentu di masa depan tidak akan ada guru yang mampu mengabdikan di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas

Penyelenggaraan pendidikan di Papua sendiri memiliki payung hukum baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, tentu payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Papua tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu melalui penyelenggaraan pendidikan. Sementara dalam konteks payung hukum khusus, maka Papua menjadi salah satu wilayah yang memperoleh status khusus dan tidak semua wilayah di Indonesia mendapatkannya. Misalnya saja melalui UU Otonomi Khusus Papua, yakni UU No 21 tahun 2001 yakni pemerintah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih luas bagi Papua baik itu provinsi atau kabupaten kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Andhini, 2025). Menariknya payung hukum khusus ini diikuti oleh pendanaan otonomi khusus setiap tahunnya dengan jumlah puluhan triliun. Dana otonomi khusus Papua harus dialokasikan untuk sektor pendidikan di Papua minimal 30% dari total keseluruhan dana otonomi khusus. aturan ini dilakukan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga pemerataan pendidikan dapat dicapai (Soesatyo, 2021).

Namun demikian, sejak adanya dana otonomi khusus lebih dari dua dekade berjalan di Papua, penyelenggaraan mutu pendidikan masih cukup memprihatinkan. Hal ini tentu tidak sebanding di mana kucuran dana puluhan triliun setiap tahunnya tidak sejalan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Papua. Bahkan tahun 2023 setidaknya ada 602 ribu anak di Papua, baik itu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan. Penyebabnya sangat kompleks, termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup miris (Sucahyo, 2023). Selain itu, pembangunan pendidikan Papua dinilai belum searah dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan infrastruktur sekolah, ruang kelas dan sarana prasarannya, dan ketersediaan tenaga pendidik (Alfasisromarakap et al., 2021). Masalah ini menimbulkan ketimpangan akses penyelenggaraan pendidikan di Papua, di mana pemerataan masih menjadi masalah utama dalam menata mutu pendidikan di Tanah Papua.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) tahun 2024, secara umum Pulau Papua menjadi wilayah dengan angka literasi terendah di Indonesia. Terlebih bagi anak-anak Papua pedalaman, seperti Asmat dan Wamena yang bahkan dapat dikatakan tidak ada penguasaan literasi (WVI, 2024). 30% dari keseluruhan siswa SD di Papua belum bisa membaca. Ini artinya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas masih jauh panggang dari api. Selama ketersediaan guru di Papua belum diselesaikan, maka untuk menaikkan indeks literasi dan numerasi tidak akan bergeliat. Oleh karena itu, akselerasi pendidikan berkualitas menjadi satu-satunya jalan dalam meningkatkan dan menumbuhkan budaya numerasi dan literasi di Papua. Jika guru saja terbatas bahkan minim, bagaimana mereka akan menjadi masyarakat yang terdidik di masa depan (Itsaini, 2024).

Kesetaraan Kesempatan dalam Mengakses Pendidikan

Kesetaraan kesempatan dalam mengenyam pendidikan di Papua masih menjadi isu krusial, terkhusus di daerah-daerah pedalaman yang terpencil. Jangankan berbicara kesetaraan kesempatan, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja mereka perlu bekerja keras untuk mencukupinya. Kebutuhan pangan bagi mereka akan menjadi prioritas yang diupayakan dulu sebelum berpikir tentang pentingnya pendidikan bagi mereka (Dike et al., 2025). Maka dari itu, akan menjadi wajar apabila kesenjangan akses, mutu, dan kualitas pendidikan di sana masih cukup tinggi walaupun terkadang pemerintah pusat beralih telah memberikan berbagai program layanan pendidikan melalui dana otonomi khusus.

Apabila merujuk pada data tabel 1 yakni terkait dengan pergerakan indeks pembangunan manusia di Papua tahun 2022 hingga 2024 ada fakta menarik. Jika kita teliti terhadap pembacaan data tersebut, ada

kecenderungan bahwa di kawasan-kawasan Papua yang dekat dengan pusat ekonomi dan pemerintahan, maka angka indeks pembangunan manusia cenderung tinggi. Sebaliknya jika kawasan-kawasan Papua jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi, maka mereka cenderung memiliki angka indeks pembangunan manusia yang rendah. Artinya pembangunan Papua yang dilakukan oleh pemerintah cenderung terpusat di kawasan urban dan tidak merata (Tutukansa & Tuffahati, 2022a). Akibatnya di kawasan-kawasan pedalaman dan terpencil Papua cenderung tidak terjamah dari pembangunan. Oleh karenanya nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi di Papua di dominasi pada kawasan-kawasan yang sudah urban dan lebih maju.

Menyikapi hal tersebut maka pengaturan kembali terhadap kesempatan dan kesetaraan pendidikan bagi Papua perlu dilakukan. Reformulasi kebijakan pendidikan yang mampu untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan adalah satu keniscayaan bagi Papua untuk mampu keluar dari keterkungkungan sosial dan mencapai akselerasi kesejahteraan. kehadiran negara dalam menciptakan kesempatan dan kesetaraan pendidikan khususnya di kawasan pedalaman Tanah Papua sangat dinantikan. Pasalnya, sampai saat ini negara cenderung tidak responsive dalam menjawab tantangan yang dialami Papua, khususnya di Bidang pendidikan. Akibatnya dalam konteks pembangunan kesetaraan dan kesempatan pendidikan di Papua yang cukup timpang menunjukkan bahwa negara masih absen untuk hadir dan menyelesaikan masalah itu (Indonesia, 2022).

Di era otonomi khusus Papua, pendidikan Orang Asli Papua (OAP) dinilai semakin buruk. Kebijakan otonomi khusus yang diikuti oleh dana otonomi khusus dinilai sebagai pihak hanya sebatas janji dan belum menciptakan kesetaraan dan kesempatan pendidikan di Papua. pasal 36 ayat 2 pada UU Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 secara jelas menyatakan bahwa *“sekurang-kurangnya 30% penerimaan sebagaimana uyang dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 huruf b angka 4 dialokasikan untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi”*. Lebih lanjut pada pasal 56 setidaknya ada 6 ayat yang mengatur tentang pendidikan di Papua.

1. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
2. Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagaimana pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.
3. Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana pada no 1 sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
4. Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 1-5 ditetapkan berdasarkan Perdasu.

Ayat-ayat yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua merupakan dasar hukum yang diberikan negara atas pencerdasan masyarakat Papua melalui pendidikan. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak secara signifikan memberikan dampak bagi perbaikan pendidikan di Papua. Meskipun lebih dari 20 tahun berjalan, nyatanya kesempatan dan kesetaraan pendidikan di Papua masih jauh walaupun angka statistik mengalami peningkatan gradual yang lambat (Saputra, 2025). Ketimpangan cukup terlihat dengan membandingkan berbagai angka statistik sosial ekonomi antara kawasan-kawasan papua yang berada di pedalaman dan terisolir dengan kawasan-kawasan urban atau di pusat pemerintahan. Oleh karena itu peninjauan kembali terhadap regulasi tersebut menjadi penting dilakukan oleh pemerintah agar UU Otonomi

Khusus tersebut berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan secara merata dan berkeadilan di Tanah Papua. Tabel 3 merupakan angka partisipasi kasar sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021 dalam tiga klaster rentang usia.

Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kuat. Tidak heran apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan selalu menjadi barometer yang sangat menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam akses pendidikan akan menjauhkan masyarakat dari spectrum manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan terkhusus di Bumi cenderawasih masih menjadi antangan sampai saat ini. Terlebih untuk mengejar berbagai ketertinggalan yang ada, termasuk ketertinggalan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. maka dari itu, berbagai pihak terutama pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah yang ada di Papua. hanya dengan mendorong partisipasi sekolah di Papua maka upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia di Papua tidak sekedar omong kosong, namun ada upaya nyata dan lebih konkret untuk diwujudkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, upaya yang secara sadar terus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di Papua. Hal itu tercermin dari adanya peningkatan secara lambat angka-angka indeks pembangunan manusia di Papua secara gradua dari tahun ke tahun. Namun, sayangnya peningkatan angka-angka secara gradual itu masih saja membuat Papua menjadi provinsi tertinggal diantara provinsi lain di Indoneia. Di satu sisi tentu uapaya negara dalam mendorong pembangunan pendidikan di papua tentu kita hargai. Di sisi yang lain, negara juga harus bekerja keras untuk pendidikan di Papua agar mampu mengejar segala ketertinggalan yang ada. Itu ialah bentuk komitmen negara terhadap kesejahteraan yang ada di Papua. komitmen itu sampai hari ini masih terus ditunggu dan dinanti-nanti oleh mereka. Masyarakat Papua meyakini hanya dengan akses peendidikan yang berkualitas dan layak maka mereka akan merasakan bagaimana menjadi masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan. sebagai refleksi kritis, tabel 3 merupakan pencapaian angka partisipasi sekolah dalam kurun 20119-2021 berdasar tiga interval tahun (7-12 tahun), (13-15 tahun), dan (16-18 tahun) menurut BPS 2023.

Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua tahun 2019-2021

Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
	7-12			13-15			16-18		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Merauke	95,83	97,38	95,76	97,35	97,23	97,23	77,42	78,7	81,75
Jayawijaya	90,78	90,74	89,71	89,2	89,12	88,97	72,78	72,91	80,13
Jayapura	96,36	95,92	95,95	94,7	94,63	95,23	83,75	82,25	84,32
Nabire	94,63	94,61	94,37	94,41	94,38	95,51	80,04	77,22	83,36
Kepulauan Yapen	94,69	94,67	93,78	95,9	95,03	95,12	78,06	78,73	78,86
Biak Numfor	94,77	97,62	97,5	97,49	97,96	97,47	82,48	84,96	89,11
Paniai	84,02	84,07	83,12	79,82	80,88	80,17	46,62	47,56	46,56
Puncak Jaya	77,59	77,26	75,67	65,77	65,57	65,97	39,53	32,94	37,65
Mimika	94,16	95,58	95,56	95,28	95,17	94,75	81,79	72,2	84,63
Boven Digoel	91,13	92,21	90,96	91	90,83	91	62,37	61,26	62,02
Mappi	86,1	86,91	86,49	81,01	82,06	81,69	49,7	40,93	54,32
Asmat	82,48	82,09	79,97	80,46	80,08	80,4	53,06	29,08	55,54
Yahukimo	62,57	66,18	66,19	66,15	66,04	65,52	32,92	24,08	34,16

Pegunungan Bintang	71,44	74,07	73,83	70,94	71,25	71,7	37,41	37,22	36,66
Tolikara	66,63	66,08	64,61	61,45	61,99	61,45	45,87	39,37	45,58
Sarmi	92,97	92,95	91,02	91,33	91	91,38	72,08	71,99	71,75
Keerom	90,83	90,74	89,4	89,09	88,82	88,74	74,93	70,33	77,88
Waropen	93,21	96,87	96,52	94,1	93,71	93,45	79	77,72	78,6
Supiori	94,54	96,57	96,2	91,93	92,19	92,11	77,03	76,55	76,46
Mamberamo Raya	97,41	97,41	96,44	96,11	96,27	96,57	64,91	68,94	68,88
Nduga	57,98	60,83	59,99	55,92	57,01	57,25	36,9	37,92	37,09
Lanny Jaya	77,07	77,06	77,49	74,22	75,37	75,26	60,36	60,29	60,18
Mamberamo Tengah	85,95	85,7	84,93	81,11	81,89	81,47	56,41	56,79	56,56
Yalimo	89,29	89,34	88,81	61,57	62,19	62,62	58,75	56,64	60,8
Puncak	52,21	52,22	51,61	30,44	32,43	31,98	28,2	22,55	27,71
Dogiyai	85,9	85,88	85,59	84,6	83,44	83,84	57,17	65,16	65,82
Intan Jaya	61,92	61,45	60,96	53,27	52,79	52,34	45,91	38,8	45,1
Deiyai	63,78	65,82	65,35	58,85	60,05	59,52	56	53,25	46,26
Kota Jayapura	97,76	97,75	98,03	97,94	98,07	97,69	92,78	92,21	97,12
Provinsi Papua	82,62	82,99	83,43	80,11	80,48	80,02	62,11	64,83	63,98

Sumber: (BPS, 2023)

Berdasarkan data tersebut, jika dicermati secara teliti dan seksama maka kawasan-kawasan di Papua yang memiliki intensitas kekerasan dan konflik tinggi cenderung memiliki angka partisipasi sekolah yang cukup rendah. Angka partisipasi sekolah di kawasan konflik dan kekerasan konflik itu semakin tampak pada rentang usia 16-18 tahun. Rentang ini ialah rentang siswa yang berada dalam kelas sekolah menengah atas. Kabupaten seperti Nduga, Puncak, Yalimo, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika dalam APS 16-18 tahun memiliki angka yang cukup kecil. Dibandingkan dengan kawasan lain yang berada lebih dekat atau di pusat pemerintahan dan perekonomian. Misalnya saja Biak Numfor, Merauke, Jayapura, dan Nabire akan memiliki angka APS yang jauh lebih tinggi. Hal itu disebabkan mereka dekat bahkan kawasan mereka menjadi pusat pembangunan.

Pada konteks tersebut ada dikotomi pembangunan pendidikan yang cukup nampak antara kawasan pusat pemerintahan-terisolir/pedalaman, atau urban dan rural. Oleh karena itu masalah tersebut harus menjadi pijakan dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan di Papua sehingga terjadi pergeseran pembangunan sehingga terjadi pemerataan yang berkeadilan. Pergeseran tersebut secara tidak langsung akan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini masih terpusat di kawasan pusat pemerintahan Papua.

Tantangan Signifikan Perwujudan Aksesibilitas Pendidikan

Tantangan aksesibilitas pendidikan di Papua secara signifikan terhambat oleh faktor geografi dan keamanan. Kondisi geografis Papua yang mayoritas berupa pegunungan dan hutan belantara secara tidak langsung telah menciptakan ketidakamanan laten yang mampu bertahan lama hingga hari ini. Berbagai gejolak kekerasan dan konflik terus terjadi. Mirisnya sektor pendidikan tidak lepas dari dampak konflik dan kekerasan yang terjadi. Bagi kawasan-kawasan konflik dan kekerasan di Papua, sektor pendidikan nyaris dikatakan lumpuh. Banyak sekali kasus sekolah-sekolah dibakar dan guru-guru kelas mengalami kekerasan bahkan dibunuh hidup-hidup oleh TPNPB-OPM. Walaupun negara hadir dengan pendekatan militer untuk menumpas TPNPB-OPM, sampai hari ini belum tuntas dilakukan. Kejadian pembakaran sekolah-sekolah bagi masyarakat Papua dan pembunuhan guru-guru terus terjadi dan berulang. Tabel 4 merupakan kasus pembakaran sekolah

yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) papua tahun 2023-2024 berdasarkan laporan Kepolisian Papua.

Tabel 4. Kasus Pembakaran Sekolah oleh KKB Sepanjang 2023-2024

No	Tanggal Kejadian	Sasaran Pembakaran	Lokasi Kejadian
1	9 Januari 2023	SMKN 1 Pegunungan Bintang	Pegunungan Bintang
2	12 Maret 2023	SD YPK Metanoia	Distrik Dekai Kabupaten Yakuhiro
3	14 Maret 2023	SDN Dekai	Distrik Dekai Kabupaten Yakuhiro
4	16 Maret 2023	SMPN 2 Dekai	Kabupaten Yakuhiro
5	17 Agustus 2023	SMAN 1 Ilaga	Kabupaten Puncak
6	10 November 2023	SMPN 1 Gome	Distrik Gome Kabupaten Puncak
7	1 Mei 2024	SD Inpres Pogaya	Distrik Homeyo kabupaten Intan Jaya
8	22 Mei 2024	PAUD, SD, SMP YPPGI Kepas Kopo	Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai

Sumber: (Kapolda Papua, 2024)

Berdasarkan data di atas dalam kurun 2023 hingga 2024 sudah banyak institusi pendidikan di wilayah konflik yang dibakar oleh KKB. Hal serupa tentu terjadi di wilayah-wilayah lain di mana sebetulnya KKB tidak hanya menyasar institusi pendidikan saja, namun fasilitas layanan publik secara keseluruhan. Belum lagi banyak guru yang terdampak akibat kejadian tersebut bahkan mereka banyak yang merengas nyawa. Namun demikian, sampai saat ini konflik dan kekerasan terus berlangsung. Lebih-lebih di kawasan konflik dan kekerasan di Papua, tentu fasilitas pendidikan akan menjadi sasaran. Akibatnya iklim pendidikan di kawasan kekerasan dan konflik di Papua tidak lagi menjadi tempat yang kondusif dan nyaman. Hal ini tentu menjadi sangat wajar apabila para guru tidak merasa nyaman dan aman apabila ditempatkan di wilayah-wilayah konflik dan kekerasan Papua. oleh karena itu negara harus mampu untuk menyudahi konflik Papua yang sudah berkepanjangan agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman. Tantangan itu bila mampu diselesaikan maka upaya untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan di Papua akan mampu diakselerasi secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan aksesibilitas pendidikan holistik di Tanah Papua masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Tantangan aspek aksesibilitas pendidikan di Tanah Papua faktor dominannya dipicu oleh sektor geografis berupa pegunungan-pegunungan dan hutan yang hingga saat ini masih menjadi kendala. Faktor geografis ini menyebabkan angka partisipasi sekolah sangat lemah sehingga pada akhirnya jarak rumah engan sekolah menjadi persoalan seius.

Selain itu, kualitas penyelenggaraan pendidikan juga masih cukup ironis di tengah kucuran dana otonomi khusus. Keterdukungan sarana dan prasarana pendidikan termasuk ketersediaan guru dan institusi sekolah masih terbatas. Terlebih diperparah dengan kondisi keamanan di Tanah Papua yang masih bergejolak. Situasi ini menjadikan persoalan pemajuan pendidikan sebagai basis pembangunan di Tanah Papua memerlukan kehadiran negara yang optimal. Intervensi negara dalam membangun pendidikan di Tanah Papua dengan segala instrumen baik anggaran maupun instrumen keamanan menjadi langkah besar dalam mengangkat pendidikan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu selama kehadiran negara

belum optimal maka pendidikan holistik berkualitas di Tanah Papua akan menjadi wacana mengingat tantangan yang dihadapi memerlukan kolaborasi yang kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Choirunnisa, M.I.Kom selaku rekan kerja penelitian yang berasal dari Universitas Pamulang. Atas dorongan, masukan, dan kritiknya tulisan ini mampu diselesaikan dengan baik. Selain itu, kepada homebase penulis yakni Universitas Selamat Sri kami haturkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan Dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Di Era Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 141–153. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1870>
- Andhini. (2025). *DPR: UU Otsus Papua Berikan Kewenangan Lebih Luas Bagi Rakyat Papua*. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17857&menu=2>
- Azkia, I. (2024). *Kesenjangan Pendidikan Pada Daerah Papua*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/nezgstn04/kesenjangan-pendidikan-pada-daerah-papua-22oygEkdx0C>
- Bappeda. (2024). Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2023. *Laporan Pendidikan Papua 2023*, 01(02), 1–80.
- Berman, J., Graham, L., Bellert, A., & McKay-Brown, L. (2023). *Responsive Teaching for Sustainable Learning: A Framework for Inclusive Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003299813>
- BPS. (2023). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen), 2019-2021*. Bps.Go.Id. <https://papua.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQwIzI=/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>
- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Cahyaningsih, A., & Fitriady, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Creswell, J. (2014). *Research Design “Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”* (Vicki Knight Editorial (ed.); 4 edition). SAGE Publications, Inc.
- Dike, Y., Ismanto, B., & Satyawati, S. T. (2025). Analisis Pandangan Masyarakat Papua Terhadap Pendidikan Sepanjang Hayat: Kebutuhan, Hambatan, dan Solusi. *CONSILIUM Journal : Journal Education and Counseling*, 05(01), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/consilium.v5i1.5736>
- Hisanah, F. A., Rahayu, H. D. K. T., Sirait, J. A. R., Nur, R. F., & Yanuarsyah, S. (2022). Pembangunan Pendidikan Dengan Meninjau Ketersediaan Sarana Prasarana Serta Tenaga Didik Di Indonesia Timur. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 185–190.
- Indonesia, A. B. P. E. N. (2022). *Riset: negara masih absen dalam pendidikan di Papua, dari ketimpangan guru hingga salah manajemen beasiswa*. The Conversation. <https://theconversation.com/riset-negara-masih-absen-dalam-pendidikan-di-papua-dari-ketimpangan-guru-hingga-salah-manajemen-beasiswa-175062>
- Indonesia, A. B. P. E. N., Ristiyono, D. A., & Raynaldi, R. F. (2025). *Gagal Fokus Prabowo: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Siang Gratis*. Theconversation. <https://theconversation.com/gagal-fokus-prabowo-papua-lebih-butuh-akses-pendidikan-bukan-makan-siang-gratis-250181>
- Itsaini, F. (2024). *Literasi Papua Terendah di Indonesia, 30 Persen Siswa SD Belum Bisa Baca*. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/05/17/130000986/literasi-papua-terendah-di-indonesia-30-persen-siswa-sd-belum-bisa-baca#:~:text=Literasi Papua Terendah di Indonesia%2C 30 Persen Siswa SD Belum Bisa Baca,-Kompas.com%2C 17&text=JAKARTA%2C KOMPAS.com ->

- Kapoldapapua. (2024). *Pembakaran Sekolah Oleh KKB di Tahun 2023-2024*. Tribratanews.Papua.Polri.Go.Id. <https://tribratanews.papua.polri.go.id/pembakaran-sekolah-oleh-kkb-di-tahun-2023-2024/>
- Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 81. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2401>
- Nugroho, N. P. (2025). *Fakta-fakta Guru di Yahukimo yang Tewas Diserang TPNPB OPM*. Tempo.Com. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-guru-di-yahukimo-yang-tewas-diserang-tpnpb-opm-1223484>
- Oruh, S., Agustang, A., & Maswati, R. (2023). Inklusi Pendidikan Dan Dinamika Kebudayaan Lokal Di Papua. *Edusociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6, 1413–1424. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1718>
- Putra, N. (2025). *Amnesty International: Respons terhadap Siswa Papua yang Demo Tolak MBG Berlebihan, Melanggar HAM*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-respons-terhadap-siswa-papua-yang-demo-tolak-mbg-berlebihan-melanggar-ham-1209105>
- Rahayu, L. S. (2024). *Ma'ruf: Akses Pendidikan hingga Kesehatan di Papua Masih Terbatas*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7432094/maruf-akses-pendidikan-hingga-kesehatan-di-papua-masih-terbatas>
- Rahma, R. A., & Arcana, I. M. (2021). Tingkat Risiko Putus Sekolah Pada Remaja Di Provinsi Papua Tahun 2018. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 672–681. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.468>
- Saputra, I. (2025). *Pendidikan OAP Semakin Buruk di Era Otsus Papua*. Melanesiatimes.Com. <https://melanesiatimes.com/2025/02/02/pendidikan-oap-semakin-buruk-di-era-otsus-papua/>
- Setiawan, H. (2022a). Human Security and the Special Autonomy. *Bestuurskunde:Journal of Governmental Studies*, 02(November 2021), 89–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.89-102>
- Setiawan, H. (2022b). Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua. *SOSHUM Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities]*, 12(1), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.13-23>
- Setiawan, H. (2022c). The Paradox of Plenty Challenges in Regional Development in Aceh After Two Decades of Special Autonomy. *Bestuurskunde:Journal of Governmental Studies*, 2(1), 1–16(December 2021), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.1-16>
- Setiawan, H. (2024). Political Bondage (Ijon) and Democracy: How do Natural Resources Build High Electoral Political Financing Orders? *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.1-14>
- Setiawan, H., & Choirunnisa, C. (2023). The paradox of special autonomy : Why does wealth make Papua poor ? Paradoks otonomi khusus : Mengapa kekayaan dapat memiskinkan Papua ? *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(03), 408–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V36I32023.408-420>
- Setiawan, H., Widiono, G. W., & Hikmah, G. (2023). The Formation of the New Autonomous Region of Papua and Welfare Guarantees in the Decentralization Policy. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 319–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1181>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Soesatyo, B. (2021). *Bamsoet: Dana Otsus Papua Harus Mampu Tingkatan Mutu Pendidikan*. Mpr.Go.Id. <https://mpr.go.id/berita/Bamsoet:-Dana-Otsus-Papua-Harus-Mampu-Tingkatan-Mutu-Pendidikan#:~:text=Jumlahnya+ditingkatkan+dari+2+persen,pendidikan+masyarakat+di+Tanah+Papua.>
- Sucahyo, N. (2023). *Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah, Apa yang Salah?* Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html>

- Sutan, A. J., & Setiawan, H. (2024). Collaborative Governance Pentahelix : Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tatanan Sumber Daya Unggul Inclusive Education City Towards a Superior Resource System. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(2), 202–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.311>
- Tutukansa, A. F., & Tuffahati, E. D. (2022a). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T di Indonesia. *Jurnal Khazanah*, 14(2), 84–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art4>
- Tutukansa, A. F., & Tuffahati, E. D. (2022b). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 84–92. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art4>
- Wijaya, A. W. A. (2023). *Pendidikan untuk Papua Sejahtera*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/11/pendidikan-untuk-papua-sejahtera>
- WVI. (2024). *Kemampuan Literasi Papua Terendah di Indonesia, Gerakan Baca Tulis Harus Diperkuat*. Wahanavisi.Org. <https://wahanavisi.org/id/media-materi/media/detail/kemampuan-literasi-papua-terendah-di-indonesia-gerakan-baca-tulis-harus-diperkuat>